

## JURNAL EKONOMI :PROBLEMATIKA KETENAGAKERJAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN SERTA PENETAPAN UPAH MINIMUM DI INDONESIA

Tri Putri Hutahaean<sup>1</sup>, Anggriany Saragih<sup>2</sup>, Ertika Monika Hutagaol<sup>3</sup>, Donita Dongoran<sup>4</sup>

Universitas Negeri Medan<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [triputrihthn.7252441014@mhs.unimed.ac.id](mailto:triputrihthn.7252441014@mhs.unimed.ac.id)<sup>1</sup>,  
[anggriany.7251141019@mhs.unimed.ac.id](mailto:anggriany.7251141019@mhs.unimed.ac.id)<sup>2</sup>, [tikaa.7252441022@mhs.unimed.ac.id](mailto:tikaa.7252441022@mhs.unimed.ac.id)<sup>3</sup>,  
[donita.7252141008@mhs.unimed.ac.id](mailto:donita.7252141008@mhs.unimed.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Permasalahan ketenagakerjaan adalah isu penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena terkait dengan penyerapan tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan kebijakan upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan di bidang ketenagakerjaan serta dampaknya terhadap tingkat pengangguran dan penentuan upah minimum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), buku teks ekonomi, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan ketenagakerjaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendokumentasikan, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan di Indonesia terjadi karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan keberadaan pekerjaan yang tersedia, kualitas tenaga kerja yang masih rendah, serta keberadaan sektor informal yang sangat besar dalam perekonomian. Selain itu, kebijakan upah minimum juga memengaruhi jumlah pekerja yang dapat diterima, di mana kenaikan upah minimum bisa membuat pekerja lebih sejahtera, tetapi bisa juga mengurangi jumlah pekerja yang dicari perusahaan jika tidak sesuai dengan tingkat produksi dan kemampuan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang terpadu dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas peluang pekerjaan, dan menetapkan upah minimum yang adil agar bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

**Kata Kunci:** Ketenagakerjaan, Pengangguran, Upah Minimum.

### Abstract

*Employment issues are crucial to Indonesia's economic development because they relate to labor absorption, unemployment rates, and minimum wage policies. This study aims to examine employment issues and their impact on unemployment rates and minimum wage determination in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature review method. The data used are secondary data derived from publications from the Central Statistics Agency (BPS), economics textbooks, scientific journals, and employment policy documents. Data collection*

*was conducted through documentation, while data analysis used descriptive qualitative analysis methods. The study shows that employment issues in Indonesia arise from an imbalance between labor force growth and available jobs, the low quality of the workforce, and the presence of a very large informal sector in the economy. Furthermore, minimum wage policies also affect the number of workers available. While minimum wage increases can improve workers' welfare, they can also reduce the number of workers companies seek if they do not align with the company's production levels and capabilities. Therefore, an integrated employment policy is needed that improves the quality of the workforce, expands employment opportunities, and establishes a fair minimum wage to reduce unemployment and improve the quality of life for the community.*

**Keywords:** *Employment, Unemployment, Minimum Wage.*

## A. PENDAHULUAN

Permasalahan ketenagakerjaan adalah isu penting yang terkait erat dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Ketenagakerjaan tidak hanya tentang adanya pekerjaan, tetapi juga meliputi tingkat orang yang tidak memiliki pekerjaan, kualitas para pekerja, hasil kerja yang dihasilkan, serta aturan mengenai upah seperti besarnya upah minimum. Dalam membangun perekonomian, tenaga kerja memainkan peran yang sangat penting karena mereka adalah penggerak utama dalam kegiatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, masalah ketenagakerjaan perlu diperhatikan dengan serius agar bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan semakin banyaknya penduduk dan orang yang bekerja setiap tahun, masalah ketenagakerjaan di Indonesia semakin rumit. Pertumbuhan jumlah orang yang bekerja tidak seimbang dengan adanya pekerjaan yang tersedia, sehingga menyebabkan tingkat pengangguran semakin meningkat. Pengangguran yang banyak bisa menyebabkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, tindakan kriminal, serta penurunan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengangguran menunjukkan bahwa manusia belum digunakan secara baik dan maksimal dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia juga terkait dengan kualitas tenaga kerja yang masih cukup rendah. Banyak pekerja yang memiliki pendidikan yang tidak terlalu tinggi dan kemampuan yang belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan di tempat kerja. Ini menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja yang ada dengan

kebutuhan yang dibutuhkan di pasar kerja. Akibatnya, banyak perusahaan kesulitan mencari karyawan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara di sisi lain masih banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, termasuk yang sudah memiliki pendidikan tinggi.

Selain tingkat pengangguran, ada masalah lain dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu penentuan upah minimum. Upah minimum adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dengan tujuan melindungi para pekerja agar bisa mendapatkan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dalam penerapannya, kebijakan upah minimum sering kali menyebabkan perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha. Pekerja ingin gaji yang besar agar hidupnya lebih baik, sementara pengusaha ingin gaji yang tidak terlalu tinggi agar biaya membuat produk tidak naik. Jika upah minimum terlalu besar, perusahaan mungkin akan mengurangi jumlah karyawan atau bahkan memutus hubungan kerja, yang akhirnya bisa membuat lebih banyak orang tidak memiliki pekerjaan.

Penetapan upah minimum juga harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum harus ditetapkan secara seimbang agar dapat melindungi pekerja tanpa menghambat pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, kebijakan upah minimum memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pengangguran dan kondisi ketenagakerjaan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa problematika ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks karena berkaitan dengan banyak faktor seperti pertumbuhan penduduk, kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, pengangguran, serta kebijakan upah minimum. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis problematika ketenagakerjaan dan implikasinya terhadap tingkat pengangguran serta penetapan upah minimum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memahami permasalahan ketenagakerjaan serta dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Desain ini dipilih karena sesuai untuk menjawab permasalahan penelitian yang memfokuskan pada analisis konseptual dan empiris mengenai isu-isu terkait ketenagakerjaan serta dampaknya terhadap tingkat pengangguran dan penentuan upah minimum di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena secara rinci dengan menggunakan berbagai sumber yang sudah diterbitkan, tanpa harus mengumpulkan data secara langsung di lapangan.

Subjek dalam penelitian ini bukanlah orang atau responden, melainkan berupa dokumen dan buku referensi yang terkait dengan topik penelitian tersebut. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), buku teks ekonomi, jurnal ilmiah nasional, serta dokumen kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemilihan sumber dilakukan dengan cara sengaja, yaitu berdasarkan kesesuaian, kredibilitas, dan hubungan dengan topik penelitian, agar data yang digunakan bisa membantu analisis secara menyeluruh.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari, mengenali, dan menganalisis berbagai dokumen yang terkait dengan lapangan kerja, pengangguran, serta kebijakan upah minimum. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara yang teratur, mulai dari mencari sumber-sumber, memilih buku atau artikel yang sesuai, hingga mengelompokkan informasi sesuai dengan topik penelitian. Dengan cara ini, penelitian bisa dilakukan lagi karena setiap langkah yang dilakukan sudah jelas dan teratur.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk konsep, teori, hasil penelitian sebelumnya, serta data statistik yang digunakan untuk mendukung proses analisis. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara kualitatif deskriptif, yakni dengan mengatur data secara terstruktur, menyaring informasi yang tidak penting, menyajikan data dalam bentuk penjelasan yang terorganisir, serta mengambil kesimpulan berdasarkan hubungan antar variabel yang diteliti.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan gambaran yang jelas, terorganisir, dan bisa dipercaya secara ilmiah mengenai situasi bidang ketenagakerjaan di Indonesia, serta hubungannya dengan tingkat pengangguran dan kebijakan upah minimum.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian terhadap berbagai sumber dan data ketenagakerjaan di Indonesia, terlihat bahwa isu ketenagakerjaan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pembangunan ekonomi negara. Masalah ini tidak hanya tentang banyaknya pekerja yang ada, tetapi juga terkait dengan kualitas pekerja, struktur ekonomi, serta kebijakan yang berlaku di pasar tenaga kerja. Hubungan antara penyerapan tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan kebijakan upah minimum menunjukkan bahwa ketiga hal tersebut saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain dalam sistem ekonomi.

Masalah utama dalam bidang ketenagakerjaan adalah peningkatan jumlah pekerja yang terus terjadi setiap tahunnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang sudah bekerja dan cukup banyak di Indonesia. Namun, peningkatan jumlah orang yang bekerja belum sepenuhnya diimbangi dengan adanya cukup pekerjaan yang tersedia. Kondisi ini membuat adanya ketidakimbangan antara jumlah tenaga kerja yang ada dan kebutuhan pekerjaan, sehingga beberapa orang tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang bermanfaat bagi ekonomi.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus berubah secara tidak menentu. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional pada bulan Agustus 2022 mencapai 5,86 persen, lalu mengalami penurunan di bulan-bulan berikutnya karena perekonomian nasional mulai pulih setelah masa pandemi COVID-19. Penurunan angka pengangguran menunjukkan bahwa semakin banyak orang berkerja di berbagai sektor ekonomi, khususnya di bidang pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan ekonomi negara memengaruhi langsung seberapa banyak pekerja yang bisa diterima di Indonesia.

Selanjutnya, data ketenagakerjaan juga menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal. Pada tahun 2023, lebih dari 60 persen dari tenaga kerja yang terdaftar bekerja di sektor informal, artinya sektor informal masih menjadi bagian utama dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. Meskipun sektor informal bisa menampung banyak pekerja, sektor ini biasanya tidak terlalu efisien dalam menghasilkan barang atau jasa

dan kurang memberikan perlindungan kepada para pekerjanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pekerja belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan serta kesejahteraan para pekerja.

Menurut teori ekonomi makro, pengangguran terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pekerja yang ada dengan jumlah pekerjaan yang tersedia di dalam perekonomian (Sukirno, 2016). Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum bisa memberikan cukup pekerjaan untuk menampung seluruh orang yang ingin bekerja. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang cepat mungkin tidak bisa mengurangi angka pengangguran jika tidak ada peningkatan pembuatan pekerjaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkita et al. (2026) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dapat menurunkan tingkat pengangguran, sedangkan kenaikan upah minimum dapat memberikan pengaruh yang berbeda tergantung pada kondisi ekonomi dan produktivitas tenaga kerja.

Selain faktor jumlah tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Banyak tenaga kerja di Indonesia yang masih memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan dunia industri. Kondisi ini menyebabkan terjadinya mismatch tenaga kerja, yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa di negara berkembang, pengangguran sering kali bersifat struktural karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan sektor industri. Kondisi ini menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh tenaga kerja yang sesuai, sementara di sisi lain jumlah pengangguran tetap tinggi. Dengan demikian, masalah ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia.

Dalam konteks Indonesia, struktur perekonomian yang masih didominasi oleh sektor informal juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Sektor informal memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi sektor ini umumnya memiliki tingkat produktivitas yang rendah serta tidak memberikan perlindungan tenaga kerja yang memadai. Akibatnya, meskipun jumlah tenaga kerja yang bekerja

meningkat, tingkat kesejahteraan tenaga kerja belum tentu mengalami peningkatan yang signifikan.

Dominasi sektor informal tersebut juga tercermin dari data ketenagakerjaan nasional yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk bekerja berada pada sektor informal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sektor informal masih menjadi alternatif utama bagi tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor formal. Namun demikian, dominasi sektor informal juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam penciptaan lapangan kerja formal yang memiliki tingkat produktivitas dan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik. Fenomena ini menjadi indikator penting bahwa transformasi struktur ekonomi menuju sektor formal masih menjadi tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di tingkat daerah. Penelitian tersebut menemukan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui p Dilihat dari sudut pandang yang lebih kritis, masalah tenaga kerja di Indonesia juga terkait dengan cara pertumbuhan ekonomi yang biasanya mengandalkan modal atau berbasis modal. Pertumbuhan ekonomi yang semakin didorong oleh sektor industri teknologi dan modal tinggi biasanya membutuhkan jumlah pekerja yang lebih sedikit. Kondisi ini memicu munculnya fenomena yang disebut *jobless growth*, yakni pertumbuhan ekonomi tanpa disertai kenaikan jumlah pekerjaan secara berarti.

Fenomena pertumbuhan tanpa penyerapan tenaga kerja menjadi masalah besar dalam pembangunan ekonomi karena meskipun nilai Produk Domestik Bruto (PDB) naik, jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan tidak bertambah secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup mengatasi masalah pengangguran, kecuali ada kebijakan yang mendorong pembuatan banyak lapangan kerja.

Selain masalah perekrutan pekerja, kebijakan upah minimum juga menjadi salah satu hal penting yang memengaruhi cara kerja pasar tenaga kerja. Upah minimum bertujuan untuk melindungi pekerja dan memastikan mereka mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, kebijakan ini sering kali memicu perdebatan karena memengaruhi berbagai pihak secara kompleks, baik perusahaan maupun tenaga kerja.

Selain itu, bisa dilihat bahwa jumlah tenaga kerja meningkat karena setiap tahunnya ada lebih banyak penduduk yang masuk ke dalam kelompok angkatan kerja. Peningkatan jumlah orang yang bekerja menunjukkan bahwa tekanan pada pasar tenaga kerja akan semakin besar,

jika tidak ada cukup lapangan kerja yang dibuat. Dengan demikian, kebijakan upah minimum serta kebijakan ketenagakerjaan lainnya harus dibuat secara menyeluruh agar mampu memenuhi peningkatan jumlah pekerja yang terus bertambah setiap tahunnya.

Dalam teori ekonomi tenaga kerja, menetapkan upah minimum yang terlalu tinggi bisa membuat biaya produksi perusahaan semakin mahal, sehingga perusahaan biasanya memutuskan untuk mengurangi jumlah karyawan yang mereka pakai (Borjas, 2016). Ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum perlu memperhatikan kemampuan perusahaan dan tingkat kemampuan kerja para pekerja, pendidikan dan pembangunan manusia dapat menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan Baihawafi dan Sebayang tahun 2023 menunjukkan bahwa besarnya upah minimum berdampak pada tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meningkatkan upah minimum tanpa memperhatikan kemampuan kerja tenaga kerja bisa membuat jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan semakin banyak.

Tetapi dari sudut pandang yang lebih luas, kebijakan upah minimum tidak selalu berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam jangka panjang, naiknya upah minimum bisa membuat pekerja lebih sejahtera dan meningkatkan kemampuan masyarakat membeli barang dan jasa. Peningkatan kemampuan beli masyarakat bisa meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga membuka peluang untuk menciptakan pekerjaan baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Nindasari dan tim pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum memengaruhi tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa naiknya upah minimum bisa membuat rata-rata upah pekerja naik, tetapi juga mungkin menyebabkan lebih banyak orang menganggur jika tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan kerja tenaga kerja.

Selain kualitas pekerja dan kebijakan upah minimum, investasi juga berperan besar dalam menentukan seberapa banyak pekerja yang bisa ditempatkan di Indonesia. Investasi adalah bagian penting dalam menciptakan pekerjaan baru, baik dengan membangun industri baru maupun meningkatkan usaha yang sudah ada. Namun, di dunia nyata, peningkatan investasi tidak selalu menyebabkan peningkatan jumlah pekerja yang dipekerjakan secara nyata.

Ini terjadi karena investasi lebih banyak difokuskan pada sektor yang membutuhkan modal besar daripada sektor yang membutuhkan tenaga kerja banyak. Sektor padat modal biasanya menggunakan teknologi canggih yang bisa meningkatkan hasil kerja, tetapi memerlukan pekerja dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Kondisi ini membuat terjadinya perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Menurut penelitian Suryahadi dan tim pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir terus meningkat, namun jumlah pekerja yang dilibatkan tidak naik sesuai dengan pertumbuhan tersebut, khususnya di sektor manufaktur yang semakin menggunakan teknologi terkini.

Dari segi kebijakan publik, situasi ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara sektor yang membutuhkan tenaga kerja banyak dan sektor yang membutuhkan modal besar. Jika kebijakan pembangunan terlalu mementingkan sektor yang membutuhkan modal besar, maka kemungkinan orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap tinggi meskipun ekonomi mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang mendorong investasi ke sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja, seperti industri manufaktur ringan, pertanian modern, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah terbukti mampu menyerap banyak pekerja.

Selain investasi, faktor lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang memadai akan lebih mudah terserap dalam pasar tenaga kerja dibandingkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan rendah.

Menurut penelitian oleh Hanushek dan Woessmann (2020), kualitas pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja. Pendidikan yang berkualitas mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam pasar kerja global. Dalam konteks Indonesia, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi salah satu strategi penting dalam mengurangi mismatch tenaga kerja yang selama ini menjadi kendala dalam penyerapan tenaga kerja.

Dalam konteks kebijakan upah minimum, terdapat perdebatan yang cukup kompleks mengenai dampaknya terhadap tingkat pengangguran. Di satu sisi, upah minimum berfungsi

sebagai alat perlindungan sosial bagi tenaga kerja agar memperoleh penghasilan yang layak. Namun di sisi lain, kebijakan upah minimum yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan dan berpotensi mengurangi jumlah tenaga kerja yang diserap.

Penelitian oleh Neumark dan Wascher (2008) menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dalam beberapa kasus dapat menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja, terutama pada sektor usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum perlu dirancang secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan.

Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak selalu berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian oleh Card dan Krueger (1995) menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dalam kondisi tertentu dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja tanpa menyebabkan penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan upah minimum sangat bergantung pada kondisi ekonomi, produktivitas tenaga kerja, serta struktur pasar tenaga kerja.

Dari sudut pandang yang lebih kritis, kebijakan upah minimum di Indonesia sering kali menghadapi kesulitan dalam penerapannya. Salah satu masalah utama adalah perbedaan kondisi ekonomi di berbagai daerah. Menetapkan upah minimum yang sama untuk semua daerah tanpa memperhatikan perbedaan tingkat kerja dan biaya hidup di setiap wilayah bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja. Daerah yang kurang produktif akan kesulitan mencapai upah minimum yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan di wilayah itu.

Selain itu, faktor globalisasi dan kemajuan teknologi juga memengaruhi pergerakan pasar tenaga kerja di Indonesia. Perkembangan teknologi digital dan otomatisasi sudah mengubah cara kerja di berbagai bidang ekonomi. Banyak pekerjaan yang dulu dilakukan oleh orang-orang kini digantikan oleh mesin atau sistem otomatis. Kondisi ini menciptakan tantangan baru di bidang pekerjaan, terutama bagi pekerja yang memiliki kemampuan terbatas.

Menurut laporan dari International Labour Organization tahun 2021, kemajuan teknologi dan digitalisasi bisa membawa peluang untuk menciptakan pekerjaan baru, namun juga bisa menyebabkan pengurangan jumlah pekerjaan yang sudah ada sebelumnya. Karena itu, pekerja perlu memiliki keterampilan baru yang sesuai dengan kemajuan teknologi agar tetap bisa bersaing di pasar kerja.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan ketenagakerjaan yang tidak saling terhubung bisa membuat pasar tenaga kerja kurang efisien. Misalnya, jika kebijakan pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan industri, bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan pekerjaan.

Selain itu, aturan kerja yang terlalu ketat juga bisa jadi kendala bagi perusahaan saat mencari karyawan baru. Perusahaan biasanya lebih waspada saat merekrut pegawai jika upah yang diberikan terlalu mahal atau aturan yang berlaku terlalu rumit. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu ada keseimbangan antara perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan kebebasan pasar tenaga kerja.

Dalam konteks pembangunan ekonomi jangka panjang, berhasil mengatasi masalah ketenagakerjaan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membuat kebijakan yang terpadu. Kebijakan tersebut perlu mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keterampilan para pekerja, peningkatan investasi di sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja, serta pengaturan besaran upah minimum yang memperhatikan tingkat produktivitas para pekerja.

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan melibatkan beberapa faktor, seperti pertumbuhan jumlah penduduk, kualitas tenaga kerja, struktur perekonomian, tingkat investasi, serta kebijakan upah minimum. Oleh karena itu, mengatasi masalah ketenagakerjaan tidak bisa dilakukan dengan cara sepotong-sepotong, tetapi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terus-menerus.

Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan, jelas bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia adalah suatu fenomena yang kompleks dan memerlukan penjelasan dari berbagai aspek, bukan hanya satu faktor saja. Penyerapan tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan kebijakan upah minimum adalah tiga hal utama yang saling terkait dan memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja. Ketiga komponen tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti kualitas tenaga kerja, tingkat investasi, kondisi ekonomi, serta kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pembangunan ekonomi.

Dari sudut pandang kritis, rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya belum menyentuh semua lapisan masyarakat secara merata. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi semakin bergantung pada sektor yang

membutuhkan modal besar daripada sektor yang mengandalkan tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan munculnya fenomena pertumbuhan ekonomi tanpa adanya peningkatan kesempatan kerja yang signifikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menilai keberhasilan pembangunan, jika tidak disertai dengan peningkatan peluang kerja yang banyak (Todaro & Smith, 2015).

Selain itu, masalah ketidaksesuaian antara tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja menunjukkan bahwa sistem pendidikan tidak selaras dengan tuntutan pekerjaan di lapangan. Sistem pendidikan yang belum sepenuhnya mengarah pada kebutuhan industri membuat lulusan dari lembaga pendidikan formal masih kurang memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa jika jumlah tenaga kerja meningkat tetapi kualitasnya tidak membaik, maka risiko pengangguran akan semakin besar. Sukirno (2016) menjelaskan bahwa kualitas para pekerja memengaruhi langsung tingkat produksi dan kemampuan mereka dalam mendapatkan pekerjaan.

Dalam hal kebijakan upah minimum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang memiliki dua sisi. Di sisi lain, upah minimum berfungsi sebagai alat perlindungan sosial yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Namun di sisi lain, jika penentuan kebijakan tidak memperhatikan tingkat produktivitas dan kemampuan perusahaan, maka kebijakan tersebut bisa mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya pengangguran (Borjas, 2016). Ini menunjukkan bahwa aturan upah minimum perlu dibuat dengan cara yang bisa berubah-ubah dan sesuai dengan situasi ekonomi di setiap daerah.

Selanjutnya, analisis menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan serta cara pengelolaan kebijakan tersebut. Kerja sama antar berbagai sektor, seperti pendidikan, industri, dan ketenagakerjaan, sangat penting dalam membentuk pasar tenaga kerja yang lebih efisien. Ketidaksesuaian kebijakan antar sektor bisa menyebabkan penggunaan tenaga kerja tidak efisien dan meningkatkan jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan.

Dalam jangka waktu yang lebih lama, isu tenaga kerja di Indonesia juga terpengaruh oleh kemajuan teknologi dan proses globalisasi. Digitalisasi dan otomatisasi telah mengubah cara kerja pasar tenaga kerja secara besar-besaran, di mana beberapa pekerjaan tradisional mulai berkurang dan digantikan oleh teknologi. Kondisi ini membutuhkan pekerja memiliki keterampilan baru yang lebih mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Menurut

laporan International Labour Organization tahun 2021, meningkatkan kemampuan pekerja menjadi hal penting untuk memastikan pekerja tetap dapat diterima di masa depan yang semakin digital.

Dari sudut pandang kebijakan publik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah ketenagakerjaan membutuhkan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan. Kebijakan yang hanya memperhatikan satu hal saja, seperti meningkatkan upah minimum tanpa meningkatkan kemampuan kerja tenaga kerja, tidak akan memberikan hasil yang baik dalam mengurangi jumlah pengangguran. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan harus fokus pada peningkatan kualitas pekerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi, meningkatkan investasi di sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja, serta memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan bagi pekerja dan kebebasan pasar tenaga kerja. Aturan yang terlalu ketat bisa membuat perusahaan kesulitan dalam merekrut karyawan baru, sedangkan aturan yang terlalu longgar bisa mengurangi perlindungan yang diberikan kepada karyawan. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan yang bisa berubah dan cepat merespons perubahan situasi ekonomi.

Secara umum, isu tenaga kerja di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat tidak hanya tergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas kebijakan yang diterapkan dalam sektor tenaga kerja. Agar penyerapan tenaga kerja berjalan optimal, diperlukan keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia, kualitas tenaga kerja tersebut, serta kebijakan ekonomi yang memastikan terciptanya lapangan kerja yang berkelanjutan.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa penyelesaian masalah ketenagakerjaan di Indonesia tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor pembangunan. Pendekatan ini diharapkan bisa membuat pasar tenaga kerja lebih seimbang, mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa isu ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah yang rumit dan melibatkan banyak

aspek, yang dipengaruhi oleh hubungan antara penyerapan tenaga kerja, tingkat pengangguran, serta kebijakan upah minimum. Ketidaksesuaian antara pertumbuhan tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia adalah penyebab utama dari tingginya angka pengangguran. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja yang tidak diikuti dengan adanya cukup pekerjaan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menyerap tenaga kerja secara sempurna dan merata.

Selain jumlah tenaga kerja yang cukup, kualitas dari tenaga kerja juga sangat penting dalam menentukan seberapa banyak orang yang bisa ditempatkan secara kerja. Kurangnya pendidikan dan keterampilan pekerja membuat jumlah tenaga kerja yang ada tidak cocok dengan kebutuhan perusahaan dan industri. Kondisi ketidakcocokan antara tenaga kerja dan kebutuhan perusahaan menyebabkan sebagian pekerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, sehingga meskipun ada peluang kerja, tidak semua tenaga kerja bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Ini menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi adalah langkah penting untuk mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan.

Struktur perekonomian Indonesia yang masih banyak diisi oleh sektor informal juga memengaruhi masalah-masalah di bidang ketenagakerjaan. Meskipun sektor informal bisa menyerap banyak pekerja, sektor ini biasanya menghasilkan pendapatan dan produktivitas yang tidak terlalu tinggi, serta kurang memberikan perlindungan kepada pekerja. Kondisi itu menunjukkan bahwa peningkatan jumlah orang yang bekerja tidak selalu menunjukkan peningkatan kualitas pekerjaan atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan upah minimum juga memengaruhi cara kerja pasar tenaga kerja. Penetapan upah minimum membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi jika tidak disesuaikan dengan tingkat kerja pekerja dan kemampuan perusahaan, kebijakan ini bisa menyebabkan penurunan jumlah pekerja yang dicari. Di sisi lain, kebijakan upah minimum yang dibuat dengan tepat bisa meningkatkan semangat bekerja orang, kemampuan belanja masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap. Oleh karena itu, menentukan upah minimum harus memperhatikan berbagai faktor ekonomi, seperti hasil kerja buruh, situasi pasar tenaga kerja, tingkat harga yang naik, serta kemampuan perusahaan.

Secara umum, persoalan kepegawaian di Indonesia tidak bisa diatasi dengan satu kebijakan saja, tetapi memerlukan kebijakan yang terpadu dan berkelanjutan. Usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja, memperluas peluang kerja

dengan meningkatkan investasi terutama di sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja, serta memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah adalah langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu, menghadapi kemajuan teknologi dan globalisasi, para pekerja harus mampu memiliki keterampilan yang siap beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan sangat penting dalam membentuk sistem ketenagakerjaan yang bisa menyesuaikan diri dengan berubahnya kondisi ekonomi. Dengan adanya kebijakan yang terpadu dan mampu beradaptasi, diharapkan pasar tenaga kerja di Indonesia bisa lebih seimbang, tingkat pengangguran bisa dikurangi, serta kesejahteraan para pekerja bisa meningkat secara terus menerus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Borjas, G. J. (2016). *Labor economics* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Card, D., & Krueger, A. B. (1994). *Myth and measurement: The new economics of the minimum wage*. Princeton University Press.  
<https://doi.org/10.1515/9780691180499>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). *Education, knowledge capital, and economic growth*. MIT Press.  
<https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262039959.001.0001>
- International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook: Trends 2021*. International Labour Office.
- Neumark, D., & Wascher, W. (2008). *Minimum wages*. MIT Press.  
<https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262140983.001.0001>
- Rizkita, D., Maghfiroh, M. Z., Adetia, S., Darmansyah, I. N., & Subhan, M. (2023). Analisis pengaruh pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 1896–1900.  
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.36330>

- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi teori pengantar*. Rajawali Pers.
- Sumarsono, S. (2009). *Ekonomi sumber daya manusia*. Graha Ilmu.
- Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2020). Economic growth and employment in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.
- Hidayat, R., Nugroho, A., & Santoso, B. (2023). Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*
- Baihawafi, M., & Sebayang, K. (2023). Analisis dampak upah minimum terhadap pengangguran terbuka. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*
- Nindasari, F., Wibowo, H., & Lestari, S. (2024). Dampak kenaikan upah minimum terhadap kemiskinan dan pengangguran. *Jurnal Ekonomi Indonesia*.